



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR PERTANYAAN KOMISI VI DPR-RI
DALAM RANGKA RANGKA RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN
DIRJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI**

Rabu, 6 Februari 2008

I. PENGANTAR

Pada kesempatan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2007-2008, sesuai dengan tugas dan Fungsinya terutama di bidang pengawasan, Komisi VI DPR RI bermaksud ingin membahas progress, capaian dan permasalahan yang terfokus pada Industri Kecil dan Menengah. Untuk dapat mengeksplorasi objek bahasan tersebut secara lebih rinci, maka kami harap Saudara Dirjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Republik Indonesia dapat memberi penjelasannya dalam Rapat Dengar Pendapat kali ini.

Selain itu pada masa reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008, kami telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah menyerap aspirasi masyarakat dan masukan dari beberapa instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak-pihak terkait lainnya. Kunjungan kerja telah dilakukan sejak tanggal 16 sampai dengan 19 Desember 2007, dan atas segala permasalahan yang telah kami himpun perlu kami bahas dengan Saudara Dirjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Republik Indonesia.

II. PERTANYAAN

1. Agar dijelaskan progress capaian hingga saat ini (2004-2007) pada Industri Kecil dan Menengah dari sasaran dan pokok-pokok rencana aksi Jangka Menengah 2004-2009 Departemen Perindustrian RI. Paparkan juga kendala dan solusi penyelesaiannya.
2. Agar dijelaskan capaian hingga saat ini dari Renstra Direktorat Jenderal IKM TA 2005-2009 terutama pada Program pengembangan IKM Unggulan Daerah dengan rincian kegiatan bantuan mesin dan bantuan peralatan serta pendirian unit percontohan. Jelaskan juga daerah yang telah mendapatkan bantuan mesin dan peralatan. Apa kendala dan solusinya?
3. Persoalan minimnya modal menjadi masalah utama bagi perajin batik di Pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya yang sebagian besar merupakan industri kecil. Belakangan produksinya pun merosot tajam sebagai akibat dari naiknya harga bahan baku. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal IKM Tahun Anggaran 2005-2009, pada kegiatan pokok mendukung pengembangan IKM dengan memfasilitasi penyediaan akses informasi, untuk dimanfaatkan IKM terkait dengan peluang usaha, kebutuhan bahan baku dan terutama akses permodalan masuk dalam kategori program pendukung. Akses permodalan dan kebutuhan bahan baku yang selalu menjadi permasalahan dominan dalam industry IKM, mengapa kedua hal tersebut tidak masuk dalam kategori program utama Direktorat Jenderal IKM Departemen Perindustrian RI? Bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini? Sejauhmana koordinasi antar instansi dalam permasalahan ini?
4. Pada Kunjungan Kerja Komisi VI di Banten, juga ditemukan lemahnya permodalan yang dirasakan IKM setempat. Bagaimana langkah penguatan akses permodalan bagi IKM di Banten?

5. Masih Terkait dengan hal pembiayaan. Telah berlangsung peresmian Klinik Teknologi dan Energi oleh Dirjen Industri Kecil dan Menengah RI tahun 2007 lalu (28/9) di Bandung. Kabarnya Pelayanan yang akan diberikan dalam klinik tersebut adalah berupa jasa pengembangan teknologi dan percontohan mesin-mesin khususnya untuk pangan dan energi serta fasilitas untuk pembiayaannya. Bagaimana mekanisme pembiayaan dan prospek klinik tersebut? Agar dijelaskan sasaran dan output atas kegiatan klinik dimaksud.
6. Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Riau, terdapat temuan lemahnya dukungan teknologi mesin pada industri pengolahan hasil makanan dan minuman yang dilakukan oleh IKM. Bagaimana program Direktorat Jenderal IKM dalam Pengembangan IKM untuk mendukung klaster Industri Makanan dan Minuman di Provinsi Riau? Agar dijelaskan kendala dan solusinya.
7. Bagaimana konsep penyaluran fasilitas mesin peralatan bagi IKM yang berbasis pada potensi sumber daya alam yang masih dikelola secara tradisional, seperti pengolahan batu cadas untuk bangunan dan bahan serbaguna di daerah Jawa Barat?

KOMISI VI DPR RI